

BAB II

HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN QATAR SEBELUM TERJADINYA KRISIS DIPLOMATIK

Pada bab ini akan membahas lebih jauh tentang profil Indonesia termasuk luas wilayah dan arah politik luar negeri. tak hanya itu, dalam bab ini juga akan mendeskripsikan perekonomian Indonesia termasuk perkembangan ekonomi Indonesia setelah diadakannya kerjasama dengan Qatar di bidang investasi dan perdagangan.

A. Dasar-dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015)

Politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip bebas aktif. Bebas diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah-masalah atau konflik yang ada dalam lingkungan internasional tanpa berpihak pada blok-blok kekuatan atau persekutuan militer yang ada di dunia. Aktif memiliki arti bahwa Indonesia selalu memperjuangkan “kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” di dunia. Prinsip bebas aktif merupakan sumber dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia. Para pemimpin Indonesia menerapkan prinsip ini disesuaikan dengan situasi sistem internasional yang ada. (Haryanto, PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN, Desember 2014)

Prinsip bebas aktif yang menjadi prinsip dari politik luar negeri Indonesia selalu memiliki makna yang ganda. Pertama adalah tujuan dari politik luar negeri Indonesia untuk memelihara identitas nasional. Makna kedua adalah politik luar negeri ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dicantumkan di dalam pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ikut serta menjaga perdamaian dan

ketertiban dunia. Walaupun tujuan dari makna yang kedua dapat dilihat dan diidentifikasi sebagai tujuan yang bersifat eksternal, politik luar negeri juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian dua cita-cita pertama yang lebih bersifat internal. Hal ini terjadi karena, Indonesia menyadari bahwa dengan melalui peningkatan kemakmuran nasional maka peran serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dapat dilaksanakan. Bahkan dengan terpenuhinya seluruh cita-cita Indonesia tersebut, maka tujuan kemerdekaan menjadi suatu hal yang bermakna dari kedaulatan bangsa. (Safaat, Public Relations dalam Politik Luar Negeri Indonesia, 2012, hal. 122-123)

Dalam pemerintahan ataupun rezim Jokowi, politik luar negeri Indonesia lebih berorientasi kedalam (*inward-looking*) negara sebagai akibat dari tekanan politik domestik. Berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang memegang prinsip bebas dan aktif serta amanat dari konstitusi, tujuan dari adanya kebijakan Jokowi-JK tersebut selaras dengan prinsip bebas aktif. Tujuannya adalah :

1. Mengutamakan dan selalu mengedepankan identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi termasuk juga dalam membangun kerjasama internasional
2. Meningkatkan adanya peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia
3. Memperluas mandala keterlibatan regional di IndoPasifik
4. Merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri yang melibatkan peran aspirasi dan keterlibatan masyarakat.

Demikian pula dengan empat prioritas yang ditawarkan oleh presiden terpilih Jokowi, yakni (1) Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri; (2) Perlindungan sumber daya

alam dan perdagangan; (3) Produktivitas perekonomian; dan (4) Pertahanan keamanan nasional, regional serta perdamaian dunia. (Situmorang)

B. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Qatar

Semenjak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar, banyak perkembangan dan peningkatan dari hubungan kedua negara termasuk hubungan politik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kehadiran Wakil PM H.E. Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud pada penyelenggaraan UNAOC di Bali, 29-30 Agustus 2014. Sebelumnya, utusan khusus Presiden RI, Dubes Wahid Supriyadi mengantarkan surat undangan UNAOC dan diterima langsung oleh Emir Qatar H.H. Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa AL Thani. Selain itu, dalam berbagai kesempatan saat KBRI Doha menemui pejabat-pejabat tinggi negara Qatar, mereka menyatakan dukungannya kepada persatuan NKRI. (Direktorat Informasi dan Media, dan Biro Administrasi Menteri, Cetakan Kedua September 2015) Dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan usaha Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Dr Alwi Shihab dengan Qatar Chamber of Commerce and Industry (QCCI). Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua QCCI, Muhammed Bin Ahmed Bin Towar Al Kuwari dan pelaku usaha Qatar di Kantor QCCI, dipaparkan mengenai potensi investasi dan usaha sekaligus mengundang pelaku usaha Qatar untuk menghadiri TEI 2016 pada tanggal 12-16 Oktober 2016. Pertemuan ini sebagai lanjutan dari kunjungan Dr. Alwi Shihab dan para pengusaha ke Qatar sebagai pihak yang diutus khusus oleh presiden untuk Timur Tengah. Hal tersebut ditujukan untuk mengadakan pertemuan dengan penasehat menteri energi dan industri, serta pengusaha Qatar Mining, pada 13 – 14 Juni 2011. Dalam sambutannya, Muhammed Al Kuwari menyambut baik kunjungan delegasi ekonomi dan perdagangan Indonesia. Disampaikan perlunya pelaku usaha Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi

dan perdagangan RI-Qatar dengan menjajagi peluang ekonomi dan perdagangan secara langsung di Qatar.

Direktur Indonesia Trade Promotion Centre Dubai, Abu Dhabi, Gusmalinda, memaparkan mengenai Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 yang merupakan ajang pameran tahunan terbesar di Indonesia. Dijelaskan pada TEI 2015 diikuti 1.046 ekshibitor dan dihadiri lebih dari 14 ribu pelaku usaha dari mancanegara. Selain promosi TEI, dipaparkan pula potensi usaha dan investasi di bidang hilirisasi produk agribisnis dan pertambangan. Paparan dilanjutkan oleh Direktur Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Abu Dhabi, Agus Prayitno yang menjelaskan mengenai potensi dan peluang investasi khususnya pada lima sektor prioritas. Sektor tersebut industri padat karya, industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, hilirisasi, pertanian dan maritim. Disampaikan tengah memproyeksikan pula realisasi investasi untuk 2015-2019 sebesar Rp3.500 triliun atau dua kali lipat dari realisasi investasi sepanjang 2010-2014 periode Rp1.632,8 triliun. (UKPTT & OKI, 2016)

Kunjungan usaha tersebut juga diikuti Presiden Komisaris Bakrie and Brother, Irwan Sjarkawi dan Managing Director and Co-Founder, Straits Partners yaitu Carison Lau, dan Special Advisor, Straits Partners dan Chairman of Scientific Board, BPPK Kementerian ESDM, Prof. Dr. Maizar Rahman, yang tertarik dengan potensi ekonomi Qatar khususnya di bidang energi. Dubes RI untuk Qatar yaitu Muhammad Basri Sidehabi menyebutkan pertemuan usaha dengan QCCI merupakan salah satu tindak lanjut kesepakatan dari pertemuan Dubes-dubes Negara-negara ASEAN di Qatar mengenai upaya guna meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan ASEAN dan Qatar. Pelaku investasi dari negara Qatar beranggapan bahwa aturan investasi dan usaha di Indonesiamasih terhitung kurang bersaing dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Doha, Endang Kuswaya disampaikan pula mengenai kebijakan pemerintah untuk menarik bagi investor dengan penerapan online system dan one stop

service. Dr. Alwi Shihab sebelumnya melakukan pertemuan usaha antara Delegasi RI dengan Chairman Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah (ABHA) International Foundation for Energy & Sustainable Development, Abdullah bin Hamad Al-Attiyah. Ia adalah mantan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Energi dan Industri Qatar yang juga merupakan salah satu pengusaha utama dan memiliki berbagai usaha di Qatar. Abdullah bin Hamad Al-Attiyah menyatakan ketertarikannya dengan beberapa proposal proyek investasi yang ditawarkan Delegasi Indonesia. Menurut staf KBRI Doha, Boy Dharmawan, *road show* kunjungan delegasi usaha ini guna mengantisipasi kebijakan *look east policy* yang diterapkan Qatar menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan usaha dan investasi. Pertemuan usaha dilanjutkan malam hari ketika Delegasi diundang jamuan pada malam harinya oleh Wakil Ketua QCCI guna menindaklanjuti hasil pertemuan usaha. (ant, 2016)

Selain itu, hubungan kerjasama dalam bidang politik ini juga ditandai dan diawali dengan adanya kunjungan dari menteri ekonomi dan perdagangan Qatar yaitu Y.M. Sheikh Ahmed Bin Jassim ke Indonesia, dengan sekaligus menghadiri rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi *World Islamic Economic Forum* 2016. Hasil pertemuan itu adalah membahas tentang pesatnya dan melajunya hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Qatar yang telah memberikan warna dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang sudah terjalin lama sejak dibuka pada tahun 1976. Hubungan yang sudah terjalin lama tersebut dapat dikatakan berhasil karena tidak terlepas dari komitmen KBRI dalam memperkuat instrumen dan implementasi kerja sama ekonomi Indonesia-Qatar di bidang *trade, tourism, investment* atau TTI. Untuk mencapai target tersebut, KBRI menggunakan berbagai kebijakan dengan menggerakkan seluruh sumber daya termasuk potensi dari 40 ribu WNI yang berada di Qatar. Dubes RI untuk Qatar, Marsekal Madya (Purn) Muhammad Basri Sidehabi mengatakan akan menggerakkan segala upaya untuk

tercapainya diplomasi ekonomi yang lebih baik. Upaya memprioritaskan dan mengutamakan dalam diplomasi ekonomi, searah sekaligus sejalan dengan arahan kebijakan dari presiden Indonesia yaitu presiden Joko Widodo. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

Peningkatan hubungan diplomatik ini juga terlihat dari adanya kunjungan Delegasi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Dalam Negeri dan Luar negeri serta Pengawas Parlemen Qatar (Majlis as-Shura) yang dipimpin H.E. Muhamad Abdullah Al-Sulaiti, pada tanggal 1 Maret 2017. Delegasi yang didampingi Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS); Marinus Gea (PDIP); Fayakhun Andiadi (Golkar); Dave Akbarsyah Laksono (Golkar); Biem Triani Benjamin (Garindra); Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra); Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat); Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP); Andika P. Puragabaya (Gerindra).

Dr. Kharis menjelaskan tujuan dari adanya kunjungan Komisi I antara lain bertujuan untuk memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan DPR. Al-Sulaiti mengutarakan kesamaan pandangan dengan Indonesia sebagai mitra strategis yang ditandai kuatnya hubungan kedua negara dan keberadaan Majelis as-Shura sebagai lembaga legislatif dengan komposisi 45 orang, 30 anggota dipilih rakyat dan 15 anggota sisanya ditunjuk Emir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Majelis as-Shura memiliki wewenang terkait anggaran, mengawasi menteri dan membuat undang-undang. As-Shura memiliki komisi-komisi yaitu ekonomi, luar negeri, dalam negeri, infrastruktur dan undang-undang. Dr. H. Kharis menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi, investasi dan tenaga kerja antara kedua negara. Hal ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Shura dapat terus berperan dan mengambil andil dalam meningkatkan hubungan kerjasama RI-Qatar

dengan memfokuskan pada sektor kerjasama di bidang ekonomi, investasi termasuk ekspansi tenaga kerja trampil Indonesia yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 40 ribu WNI di Qatar. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017)

C. Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Qatar

Hubungan kerjasama yang terjalin antara kedua negara dinilai dapat menguntungkan nilai perekonomian Indonesia. Nilai total perdagangan RI – Qatar pada tahun 2010 mencapai nilai USD 649,3 juta, sedangkan nilai perdagangan untuk periode Januari – Agustus 2011 senilai USD 465,2 juta, atau yang berarti mengalami peningkatan sebesar 66.5% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010. (Kementerian Luar Negeri Indonesia , hal. 106) Nilai total perdagangan RI-Qatar pada tahun 2013 mencapai USD 1,57 miliar, sedikit turun dari tahun 2012 yang mencapai USD 1,69 miliar. Adapun periode Januari-September 2014 tercatat USD 1,33 miliar, naik 2,77 % dibanding periode yang sama tahun 2013. Defisit ada pada pihak Indonesia mengingat impor atas produk minyak dan gas dari Qatar yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi di tanah air. Selain itu, defisit juga disebabkan belum tingginya penetrasi pengusaha Indonesia ke Qatar.

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dengan pemerintah dan dunia usaha Qatar, termasuk dengan *Qatar Chamber of Commerce and Industry*. Pada 14 Oktober 2014, KBRI memfasilitasi one on one meeting pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kadin Timur Tengah dengan pengusaha Qatar. Saat ini Qatar telah menanamkan investasi pada sector perbankan dan telekomunikasi di Indonesia. Pada April 2014, Presiden Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, telah menyampaikan undangan kepada Qatar Investment Authority untuk berkunjung ke Jakarta dan menanamkan investasi pada proyek Jakarta Giant Sea Wall. Delegasi Qatar juga hadir pada berbagai pertemuan dan

pameran internasional di Indonesia, di antaranya Trade, Tourisme and Investment Expo Indonesia. (Direktorat Informasi dan Media, dan Biro Administrasi Menteri, 2015, hal. 79)

Pada september tahun 2015 yang lalu, presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Qatar. Kunjungan tersebut dilakukan Jokowi dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua belah pihak. Adapun hasil dari pertemuan dengan pemerintah Qatar tersebut adalah :

1. Perjanjian kerja sama mengenai bebas visa untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik.

Indonesia dan Qatar akan memberlakukan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus RI-Qatar. Hal tersebut disampaikan ketika Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi dalam acara silaturahmi menyambut kunjungan kerja Inspektur Jenderal Kemnaker, Soenarno dan Kunjungan Tim BPK yang dipimpin Kepala Auditorat III, Ali Sadli. Dubes Basri, mengatakan ketentuan tersebut dilakukan setelah Direktur Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Nurul Aulia menyerahkan Nota Diplomati Kemlu RI kepada Dubes Qatar untuk Indonesia, Ahmed bin Jassim Mohammed Ali Hamar pada tanggal 18 Oktober 2016. Penyerahan nota tersebut menandai telah terpenuhinya semua prosedur hukum yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan Indonesia untuk berlakunya Persetujuan mengenai Pembebasan Visa tersebut. Persetujuan bebas visa tersebut akan berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah nota pemberitahuan diterima oleh Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Perjanjian tersebut merupakan hasil kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Qatar, pada 14-15 September 2015. Sebelumnya pada awal 2016, Pemerintah Qatar telah melakukan ratifikasi perjanjian bebas visa tersebut. Dubes Basri mengatakan, pemberlakuan kerjasama bebas visa tersebut diharapkan

akan meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya kepercayaan dari pihak Indonesia maupun Qatar terhadap masing-masing negara. (Kertopati, Indonesia dan Qatar Berlakukan Perjanjian Bebas Visa, 2016)

2. Membahas investasi-investasi yang akan dilakukan oleh kedua pihak

Dalam hal ini, Jokowi membahas tentang pembentukan *Joint Investment Company* yang bernilai US\$ 1 Milyar, selain itu pemerintah juga membahas tentang pengambilalihan saham PT Paiton Energy Indonesia senilai 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun, oleh anak perusahaan Nebras Power Netherland BV. PT Paiton Energy merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan kapasitas 2045 MW. Paiton Energy menjual seluruh produksi listriknya ke PT PLN untuk jangka panjang. (Saputri, 2017)

Akuisisi Paiton Energy merupakan investasi pertama Nebras Power di Indonesia guna mewujudkan visi Nebras menjadi perusahaan listrik global terkemuka. Selain itu, juga dibahas tindak lanjut penandatanganan *Head of Agreement* antara PT Pembangkit Jawa Bali (anak perusahaan PLN) dengan Nebras Power untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik *Combined Cycle* berbahan bakar gas alam. Pembangkit listrik dengan nilai total investasi 700 juta dolar AS untuk daya 2 x 250 MW, rencananya dibangun di sekitar Belawan, Sumatera Utara. Dubes Basri mengharapkan akuisisi memberi keuntungan yang maksimal dan dapat meningkatkan citra investasi Indonesia serta menjadikan Nebras Power sebagai perusahaan yang mendunia. (Nebras Power, 2017, hal. 24-36)

Selanjutnya, KBRI Doha berkomitmen untuk memperkuat instrumen dan implementasi kerja sama

ekonomi Indonesia-Qatar di bidang *trade*, *tourism*, *investment* (TTI). Hal itu diungkapkan Dubes RI Doha, Marsekal Madya (Purn) Muhammad Basri Sidehabi pada rapat evaluasi kegiatan diplomasi ekonomi KBRI Doha Semester I tahun 2016, yang disampaikan pada Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada *Antara*.

1. Bidang Perdagangan (*Trade*)

Menurut data Kementerian Perindustrian, pertumbuhan yang terjadi pada kerjasama antara Indonesia dan Qatar dalam sektor perdagangan meningkat dengan rata-rata 3,8 persen per tahunnya. Pada tahun 2011, total nilai 37 perdagangan antara Indonesia dan Qatar adalah sebesar US\$ 683 juta sedangkan dalam jangka waktu lima tahun, yaitu pada tahun 2016, nilai tersebut meningkat menjadi US\$ 828 juta. (Alwyni, 2017)

Adapun Perjanjian ataupun kesepakatan yang ada di antara kedua negara ini dalam bidang perdagangan adalah adanya nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia maupun Kadin Qatar pada tahun 2017. MoU ini berisi kesepakatan dalam pembentukan *Joint Business Council* antara Kadin Indonesia dengan *Qatar Chamber of Commerce and Industry*. *Business Council* ini berupaya untuk menjadi payung hukum serta untuk mempermudah komunikasi antara kedua Kadin maupun pelaku usaha yang berada di kedua negara tersebut sehingga hal ini dapat meningkatkan dan mempermudah hubungan perdagangan ekspor maupun impor antara kedua negara. (SAW, 2016)

Untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Qatar, KBRI yang ada di Doha sedang membantu dengan melalui pencarian mitra pemasok produk Indonesia di *Source of Fortune Supermarket* yang didirikan dan dijalankan Qatindo W.L.L. Supermarket ini sudah resmi dibuka pada akhir Juli atau awal

Agustus 2016 di Al-Khor. Qatindo W.L.L adalah usaha yang dirintis Mahdi Musa, Diaspora Indonesia di Qatar. Sejak tahun 2002, Qatindo sudah menjalankan Supermarket di Doha dan saat ini memiliki omset sekitar 2-3 juta Qatari Riyal setiap tahunnya atau sekitar Rp7-10 Milyar. Qatindo juga memasok produk-produk Indonesia ke seluruh Carrefour di Qatar. (Damaledo, 2016)

Diaspora Indonesia di Qatar sangat aktif dan memiliki semangat usaha yang tinggi. Selain Qatindo, sedikitnya terdapat 7 bisnis Indonesia yang eksis di Qatar, yaitu Madani Mart Trading, Jakarta foodstuff, Tofu Cake & Cake Restaurant, Pearl of Beirut, Minang Restaurant, Central Restaurant, dan Griya Solo. Semuanya dijalankan oleh para Diaspora Indonesia di Qatar. Selain itu, sejumlah pelaku bisnis dan diaspora Indonesia di Qatar tengah merampungkan legalitas pendirian Koperasi Warga Indonesia di Qatar (KWIQ). Jenis koperasi yang akan dikembangkan adalah Koperasi Serba Usaha, mencakup bisnis makanan/minuman, jasa, dan pariwisata. Untuk mendorong peningkatan neraca perdagangan kedua negara, KBRI Doha juga terus menjaring pelaku bisnis Qatar untuk ikut pada Trade Expo Indonesia ke-31 pada 12-16 Oktober 2016 silam. (Administrator, 2016)

2. Bidang Pariwisata (*Tourism*)

Pariwisata Indonesia dan Qatar terbilang cukup menunjukkan konsistensi sejak tahun 2007. Terdapat beberapa perjanjian ataupun kesepakatan yang mengikat hubungan kedua negara ini dalam bidang pariwisata. Perjanjian ataupun kesepakatan tersebut antara lain adalah MoU mengenai *Air Transport Agreement*. Dalam kesepakatan ini, bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik dari Qatar maupun Indonesia. Selain itu, dengan adanya kesepakatan ini dapat mempermudah kegiatan ekspor dan impor kedua negara. Pada tahun 2016 sendiri,

kedua negara telah menyepakati 38 penambahan frekuensi penerbangan *Qatar Airways* ke Indonesia sebanyak 28 kali dalam seminggu, 21 kali ke Bali dan 7 kali dalam seminggu ke Surabaya serta Medan. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016) Jumlah tersebut mungkin akan terus ditingkatkan untuk dapat terus mengoptimalkan kinerja pariwisata antara Indonesia dan Qatar. Selain *Air Transport Agreement*, terdapat kesepakatan lain dalam bidang pariwisata antara kedua negara yang bermayoritas Muslim ini. Kesepakatan tersebut adalah *MoU on Tourism Cooperation* antara Indonesia dan Qatar dimana dalam kesepakatan ini memberikan kesempatan baik untuk Qatar maupun Indonesia untuk saling mempromosikan pariwisata kedua negara tersebut dalam berbagai unsur didalam negara. Hal ini bertujuan untuk dapat menarik wisatawan asing dari Indonesia, Qatar maupun negara asing lainnya untuk berkunjung ke negara yang dipromosikan oleh Indonesia ataupun Qatar. Dengan begitu devisa kedua negara akan naik karena banyaknya turis yang datang mengunjungi kedua negara. Untuk itu, KBRI Doha mengupayakan promosi pariwisata yang berisikan tampilan iklan Wonderful Indonesia di TV Al-Jazeera sebanyak 7.884 kali hingga akhir tahun 2016.

3. Bidang Investasi (*Investment*)

Bentuk perjanjian ataupun kesepakatan yang mengikat hubungan kerjasama investasi kedua negara ini antara lain adalah adanya *Bilateral Investment Treaty*, dimana pada kesepakatan tersebut Qatar dapat menanamkan modalnya ke Indonesia melalui kesepakatan Indonesia dengan *Qatar Investment Authority (QIA)* maupun perusahaan besar di Qatar baik swasta maupun milik pemerintah untuk menarik sebagian dana milik mereka agar diinvestasikan ke Indonesia. Dengan adanya *Bilateral Investment Treaty* tersebut, hubungan kerjasama Indonesia dan Qatar

dalam sektor investasi diharapkan tetap berjalan baik dan meningkat setiap tahunnya. Adanya kesepakatan ini membuat Qatar terus menaruh perhatiannya untuk berinvestasi di negara Indonesia. Terlebih ketika Qatar melihat negara Indonesia sebagai negara yang berpotensi dan negara yang memiliki iklim investasi yang sehat sehingga tidak memberikan keraguan bagi para investor asing untuk menanamkan modal mereka ke negara ini. (Wire, 2007)

Selain pembentukan *Joint Investment Company* dan pembangunan pembangkit tenaga listrik, KBRI Doha juga menjajaki dan memiliki rencana melakukan investasi dengan H.H. Sheikh Fahad bin Hamad bin Khalifa Al-Thani yang merupakan saudara dari Emir Qatar untuk membentuk investasi yang akan dilakukan. Investasi tersebut diantaranya adalah mendirikan serta melakukan pembangunan mall di Aceh yang terletak di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sudah membahas proyek-proyek investasi yang telah disampaikan ke *Qatar Investment Authority* dengan nilai sebesar 1 Milyar dolar AS. *Qatar Investment Authority (QIA)* sebagai sebuah lembaga investasi milik Pemerintah Qatar yang khusus dibentuk untuk mengelola dan menginvestasikan dana milik pemerintah senilai lebih dari 70 milyar US Dollar pada tahun 2010. Hal ini menjadis sejarah yang tercatat sebagai *sovereign wealth fund* paling aktif dan gencar melakukan investasi di luar negeri, melalui anak perusahaan investasinya seperti *Qatar Holding, Qatari Diar, Barwa International dan Hassad Food Company*. Realisasidan implementasi investasi Qatar terbesar yang ada di Indonesia meliputi investasi di bidang keuangan dan perbankan dan komunikasi yaitu *Qatar National Bank (QNB) Indonesia* dan *Ooredoo Indosat*. Untuk *QNB* dalam bekerja/beroperasi dilakukan selama selama 7 tahun di Indonesia dengan

profit mencapai 3 Milyar dolar AS dari 250 juta dolar AS. (Damaledo, 2016)

Selanjutnya dalam bidang tenaga kerja, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pembangunan dan Statistik Qatar, total penduduk Qatar hingga 31 Mei 2016 mencapai 2,587,564 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 400 ribu orang WN Qatar. Adapun jumlah WNI di Qatar menurut data International Organization for Migration (IOM) tahun 2015, mencapai 43,049 orang, yang sebagiannya bekerja di sektor migas dan jasa. Pada kunjungan Menteri Tenaga Kerja RI ke Qatar pada Mei 2016 silam, Indonesia mengundang Qatar untuk berinvestasi di balai-balai pelatihan tenaga kerja Indonesia. (Suryanto, 2016) Hal tersebut dibutuhkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan profesional. Menurut informasi yang disampaikan pihak Qatar, saat ini Indonesia masih memiliki kuota sebanyak 24,000 untuk tenaga kerjanya bekerja di Qatar. Merujuk hasil telaah KBRI Doha, bidang tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan antara lain di bidang perhotelan, konstruksi, migas, dan jasa. (Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

Berdasarkan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Qatar, tentu banyak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia. Dalam Hal ini akan dibuktikan dengan data-data dari seperti badan pusat statistik mengenai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2016. Perekonomian Indonesia tahun 2014 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 10 542,7 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp41,8 juta atau US\$3,531.5. Ekonomi Indonesia tahun 2014 tumbuh 5,02 persen melambat dibanding tahun 2013 sebesar 5,58 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 12,43 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 bila dibandingkan triwulan IV-2013 tumbuh sebesar 5,01 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,61 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2014 mengalami kontraksi 2,06 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kontraksi 22,44 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 didorong oleh aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang tumbuh 5,59 persen dan Pulau Sumatera sebesar 4,66 persen. (Badan Pusat Statistik, 2015)

Sedangkan pada tahun 2016, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau US\$3.605,1. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah tangga sebesar 6,62 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 tumbuh 4,94 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah tangga sebesar 6,72 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 21,24 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2016 didominasi oleh kelompok provinsi di

Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, dan Pulau Kalimantan 7,85 persen. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Pemerintah Indonesia tengah gencar membuka peluang investasi baik dari dalam maupun luar negeri melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif serta telah menerbitkan 14 paket kebijakan ekonomi untuk memudahkan berbisnis di Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmad Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar mengharapkan agar Pemerintah Indonesia mampu memberikan jaminan investasi kepada investor Qatar baik itu mengenai kepastian hukum maupun ketersediaan infrastruktur. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016)

D. Hubungan Keagamaan dan Pendidikan Indonesia dan Qatar

Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi melakukan MoU dengan Qatar Charity Indonesia untuk dapat membangun bangsa Indonesia. Kerjasama ini sudah terjalin selama 10 tahun dalam memberikan bantuan baik berupa sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan sosial keagamaan lainnya. Untuk itu, pada Januari 2015 diadakannya penandatanganan MoU Kemenag dengan Qatar Charity Indonesia dilakukan oleh Karo KLN Kemenag Achmad Gunaryo dengan Direktur Qatar Charity Karam Zain Aly di depan Sekjen Kemenag Nur Syam, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng Barat 3-4 di Jakarta. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Kakanwil Jabar, Aceh, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta serta pejabat Kemenag lainnya. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015)

Dalam sambutannya, Achmad Gunaryo menjelaskan bahwa Qatar Charity merupakan organisasi luar negeri yang pertama melakukan MoU dengan Kemenag. Gunaryo mengapresiasi kontribusi Qatar Charity dalam ikut memajukan Indonesia dan berharap kerjasama ini bisa terus

ditingkatkan. Sekjen Kemenag Nur Syam menggarisbawahi apa yang disampaikan Gunaryo. Menurutnya, Qatar Charity merupakan organisasi internasional NGO yang telah banyak membantu negara Indonesia dalam pembangunan SDM dan Sosial keagamaan. Sejarah mencatat bahwa Qatar Charity telah banyak berbagi dengan bangsa Indonesia dalam kapasitasnya membantu anak-anak yang terkena musibah, membangun rumah ibadah, dan bantuan sosial keagamaan lainnya. Kepada Direktorat Kemenag terkait, Nur Syam meminta untuk segera menindaklanjuti kerjasama yang sudah terjalin ini. Beliau melanjutkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan lebih banyak aktivitas-aktivitas Qatar Charity untuk Indonesia sebagai pelengkap program yang dilaksanakan pada Direktorat Kemenag. Selain itu, Nur Syam juga mengingatkan kepada pihak Qatar Charity Indonesia, agar tidak memasuki ranah-ranah politik, atau masalah-masalah lain, seperti yang sudah disepakati dalam MoU tersebut. Sebelumnya, Karam Zain Aly selaku Direktur Qatar Charity menjelaskan bahwa lembaga atau yayasan Qatar Charity Indonesia sudah banyak memberikan bantuan kepada bangsa Indonesia dalam bidang sosial keagamaan seperti, membangun masjid, mendirikan klinik kesehatan, mendirikan sanitasi air bersih, perlindungan sosial bahkan menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah.

Selanjutnya pada 29 April-3 Mei 2016, Ketua DDII Muhammad Siddik yang didampingi Wakil Ketua DDII Abdul Wahid Alwi dan Direktur Eksekutif Lazis Dewan Dakwah Ade Salamun berkunjung ke Qatar. Dalam kunjungan tersebut, Organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Qatar Center for the Presentation of Islam (QCPI) sepakat melakukan kerja sama di bidang dakwah antara kedua negara. Kerja sama berupa penyajian materi ceramah dalam bahasa Indonesia. Delegasi DDII juga bertemu dengan Direktur Urusan Islam Sheikh Khalid Shahen al Ghanim, Direktur Web Islam Jassim Abdullah al-Ali, Kementerian Awqaf, dan Direktur Eksekutif Operasi Qatar Charity Faisal Rashid Alfehadi. DDII juga bertemu dengan mantan Ketua MA Qatar Sheikh Abdulrohman Abdullah Zaid Al Mahmoud guna membahas

beberapa kerja sama. Selain pertemuan, Siddik memberikan ceramah agama kepada beberapa komunitas masyarakat di Doha dan Dukhan. Qatar melalui QCPI di bawah Kementerian Awqaf tengah menyiapkan siaran agama Islam berbahasa Indonesia melalui situs islamweb.net. Diharapkan penyiapan konten dalam bahasa Indonesia tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia tidak hanya di Qatar, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk mempercepat proses perluasan dakwah dalam berbahasa Indonesia tersebut, islamweb.net akan merekrut tenaga dari Indonesia. Selama ini islamweb.net telah menyiarkan dalam lima bahasa yaitu Arab, Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. (Hariyanto, 2016)

Dengan adanya penyajian materi berbahasa Indonesia diharapkan dapat memudahkan bagi komunitas Indonesia mempelajari Islam. WNI selama ini kesulitan memahami ceramah yang disampaikan di masjid-masjid karena disampaikan dengan bahasa Arab. Penduduk asli Qatar hanya sekitar 17% dari total 2,4 juta, selebihnya didominasi warga India, Nepal, Filipina, Bangladesh, Srilanka, Pakistan, dan Indonesia. Sementara dalam pertemuannya dengan KBRI Doha, dibahas bagaimana meningkatkan kerja sama dakwah antara Qatar-Indonesia. Siddik yang terpilih sebagai ketua umum DDII periode 2015-2020 mengutarakan, bahwa DDII merupakan lembaga yang bersifat moderat dalam pengajaran dan pengembangan dakwahnya. Selain ke Qatar, DDII juga berkunjung ke Kuwait dan dilanjutkan ke Arab Saudi guna memperoleh dukungan dalam rangka kerja sama dakwah di Indonesia.